

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan adalah menyejahterakan rakyat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dan terdiri dari bermacam-macam suku dan kebudayaan. Tidaklah mudah bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan dengan keadaan yang beranekaragam. Tentu pembangunan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan wilayah dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Rakyat Indonesia belum merasa sejahtera meskipun sumber daya alam yang dimiliki bangsa sangat besar. Sepertinya tujuan-tujuan pembangunan belum tercapai dan masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pembangunan juga belum merata diseluruh pelosok tanah air, masih banyak daerah-daerah terutama diluar Jawa yang membutuhkan perbaikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Pembangunan memang perlu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan pembangunan itu sendiri dibedakan menjadi tiga jangka waktu yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Maka dengan demikian jika pembangunan akan dilaksanakan perlu ditinjau terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pembangunan itu termasuk jangka panjang, menengah atau tahunan. Sehingga pembangunan itu dapat dilaksanakan dengan biaya yang seminimal mungkin dan mendapat hasil yang

semaksimal mungkin. (kinandika.wordpress.com/2013/02/04/pembangunan-indonesia-dan-permasalahannya)

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kondisi wilayah perdesaan masih jauh tertinggal dari wilayah perkotaan baik dari kualitas infrastruktur, komunikasi dan informasi, ketersediaan fasilitas umum serta pelayanan publik. Selain itu terjadinya penyebaran fasilitas sarana dan prasarana umum yang tidak merata atau hanya tersedia di beberapa desa semakin memperburuk kondisi desa-desa yang tertinggal.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program pembangunan desa yang masih perlu dibenahi dimana masih banyak sekali daerah di pedesaan yang pembangunannya belum ditemui pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di desa yang masih tertinggal. Keadaan seperti ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas. Masyarakat tentunya menginginkan suatu perubahan demi menunjang kemudahan dalam beraktivitas dan demi kelancaran ekonomi. Pembangunan infrastruktur sudah sepatutnya dilaksanakan dan dinikmati masyarakat sebab pemerintah pusat telah memberikan anggaran kesetiap desa untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Peran pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Kepala desa dan Perangkat desa memiliki peran yang sangat penting baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal pembangunan ini dibutuhkan keterlibatan aktif serta keseriusan Kepala desa dan Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya, kepada desa dalam mengambil keputusan terhadap pembangunan

infrastruktur desa, harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Kepala desa dan perangkat desa harus melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni menurut undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014.

Sebagai pemimpin maka kepala desa juga perlu melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya dengan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah tentang hal-hal penting yang perlu diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa sebagai pengelola keuangan desa harus secara bijak dan cermat untuk mengalokasikan dana desa dalam pembuatan program pembangunan yang menunjang kesejahteraan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa yaitu pada Pasal 112 ayat (3) yang menyebutkan bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Bapak Kardiman Siregar sebagai kepala desa silantom julu. Adapun dana untuk program pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBN dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tahun 2017, Pemerintah Desa Silantom Julu sudah mendapatkan dana desa sebanyak 800 juta.

Melalui upaya pemberdayaan, masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara aktif dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan membutuhkan keseimbangan antara

peran dan fungsi pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah sebagai pengatur dan pengurus urusan pemerintahan harus mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pemberdayaan dan masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh pemerintah.

Pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat harus mampu membangkitkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan desa. Pemberdayaan masyarakat tersebut akan efektif jika dilakukan secara transparan antara masyarakat dan kepala desa beserta perangkat desa. Keberhasilan sebuah pembangunan dalam suatu desa akan terlaksana jika ada partisipasi dari masyarakat untuk memberikan masukan-masukan bagi peningkatan perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Bapak Kardiman Siregar sebagai kepala desa silantom julu. Desa Silantom Julu terletak di kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang dipimpin oleh bapak Kardiman Siregar. Kardiman Siregar telah menjabat selama 2 tahun sebagai kepala desa. Desa Silantom Julu terdiri 6 (enam) dusun yaitu dusun pertama Simanombut, dusun kedua Lumban Pinasa, dusun ketiga Simatupang dan dusun keempat Lumban Matio, dusun kelima Padang Lancat dan dusun keenam Huta Mamungka. Adapun jumlah KK keseluruhan desa Silantom Julu berjumlah 219 KK.

Berdasarkan hasil observasi sementara, program pemberdayaan masyarakat yang sedang terlaksana saat ini di desa Silantom Julu yaitu diadakannya peran serta masyarakat dalam bergotong royong guna untuk membangun jalan menuju

lahan pertanian dan memperbaiki sarana air bersih/kamar mandi umum di desa tersebut, akan tetapi dalam melakukan upaya untuk memberdayakan masyarakat desa, Pemerintah Desa Silantom Julu juga mengalami kendala-kendala salah satunya masyarakat silantom Julu masih sedikit yang ikut serta dan berperan aktif dalam program tersebut.

Dari uraian di atas, penulis memandang bahwa Pembangunan infrastruktur di desa Silantom Julu masih kurang melibatkan masyarakat dan memberdayakan masyarakat silantom Julu, terutama dibidang pembangunan jalan yang sedang dilaksanakan saat ini. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Silantom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2017/2018”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan. Batasan masalah dapat pula dipahami sebagaimana batasan pengertian masalah, yaitu penegasan secara operasional (defenisi operasional) masalah tersebut akan memudahkan untuk melakukan penelitian (pengumpulan data) adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa

2. Kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa?
2. Apakah kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentu adanya tujuan yang hendak dicapai dan diharapkan, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa?
2. Mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa di Desa Silantom Julu Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara.

1. Manfaat Praktis

a. Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Bagi Instansi Yang Bersangkutan

Sebagai masukan kepada pemerintah daerah khususnya cara memberdayakan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa supaya berjalan dengan lebih baik lagi.

c. Bagi Masyarakat

Dapat menambah wawasan masyarakat tentang pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.